

## PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Novitasari  
novitasa03@gmail.com  
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of financial management accountability of village fund allocation, transparency, and village policy on the public wealth. While, the population was Padangan Randu village, Menganti, Gresik. Moreover, the instrument used questionnaires which were distributed to the respondents within the area of Padangan Randu village. The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used saturated sampling, in which all population was the sample. In line with, the sample consists of 75 respondents, with 59 male and 16 female. Each of the respondents had different educational background and profession. In addition, the data analysis technique used multiple analysis with SPSS. The research result concluded financial management accountability of village fund allocation had positive and significant effect on the public. On the other hand, the transparency of financial management accountability of village fund allocation had negative and significant on the society wealth. Meanwhile, the village policy had insignificant effect on the society wealth.*

*Keyword: financial management accountability of village fund allocation, transparency, village policy, public wealth.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di desa Randu Padangan kecamatan Menganti Gresik, dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan pemerintahan Desa Randu Padangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *sampling* jenuh atau sensus dengan jumlah sampel yang sama dengan jumlah populasi yang berjumlah 75 orang. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa dengan jumlah responden laki-laki 59 orang, dan responden perempuan berjumlah 16 orang dengan latar pendidikan dan jabatan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS dalam menguji analisis berganda dalam metode analisisnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi, kebijakandesa dan kesejahteraan masyarakat.

### PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah pemukiman yang ada di area pedesaan, yang memiliki nama, letak dan batas-batas wilayah yang membedakan antara desa satu dengan desa lainnya (Bastian, 2015). Desa merupakan salah satu unit terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena masih banyak tempat terpencil yang tertinggal dan belum bisa mensejahterakan penduduknya. Pada saat ini pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan desa. Pemerintah juga sangat memperhatikan perkembangan desa yang sebelumnya desa dianggap hanya bagaian struktur diatasnya, sekarang desa diberi kewenangan untuk menentukan nasib penduduknya sendiri.

Desa memiliki hak untuk mengatur atau mengurus semua kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, meningkatkan kinerja pemerintahan serta untuk kesejahteraan desa, maka pemerintah membuat kebijakan tentang alokasi dana desa. Pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah yang besar yakni 1 Milyar, dan desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana tersebut.

Menurut peraturan menteri desa nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2018, dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa melalui transfer anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk pembangunan desa, kegiatan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakatnya. Alokasi dana desa diperoleh dari hasil pembagian pajak daerah dan sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima kabupaten dan diberikan untuk desa dengan pembagian proporsional paling sedikit 10%.

Alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah tentunya memberikan amanah yang cukup besar kepada perangkat desa dalam mengelolanya. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan harus dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kejelasan. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban suatu organisasi kepada khalayak umum. Dikatakan akuntabel apabila organisasi tersebut dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan suatu tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Pertanggungjawaban disertai dengan penjelasan tiap tindakan agar dapat diketahui oleh publik dan diberikan hukuman apabila terjadi penyalahgunaan. Transparansi artinya keterbukaan, yaitu informasi dari suatu organisasi tersebut mudah diakses oleh semua orang, terutama oleh individu atau kelompok yang bersangkutan dengan organisasi tersebut. Dengan adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui laporan keuangan pemerintahannya dengan jelas.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Penentuan kebijakan harus didukung dengan respon positif dari masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk mentaati dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Kebijakan desa merupakan salah satu kebijakan pemerintahan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggungjawab desa yang tetap dalam pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Dalam setiap desa pasti kebijakan yang diambil berbeda-beda, karna norma-norma yang ditetapkan dalam lingkungan tersebut juga berbeda. Maka setiap desa dapat menentukan kebijakannya sendiri dalam memecahkan persoalan dan memajukan desanya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat membantu dalam perkembangan dan pemberdayaan desa.

Menurut Sari (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah desa.

Adanya alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa seperti pelayanan masyarakat maupun yang lainnya. Akuntabilitas dan transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat. Kebijakan desa harus dibentuk untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan sudah dipraktikkan oleh sektor publik seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pemerintahan, hubungan keagenan melibatkan eksekutif, legislatif, dan publik. Legislatif mendelegasikan kewenangan kepada eksekutif untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga merupakan agen pemilih publik, karena mereka adalah representasi publik yang diberi kewenangan dalam membuat keputusan mengenai penggunaan dana publik. Oleh karena itu, masyarakat menjadi pihak prinsipal dan pemerintah menjadi agennya. (Kurniawati, 2017).

Organisasi sektor publik bertujuan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya teori keagenan ini pemerintah tidak boleh semena-mena dan egois. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, tidak boleh membuat suatu kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi harus memberi manfaat kepada orang banyak. Dalam teori keagenan pemerintah tidak boleh mengelola dan mengalokasikan sumber dana sendirian, sehingga pemerintah harus memberikan wewenang pihak lain untuk mengelola sumberdaya (Sengaji, 2018).

### Alokasi Dana Desa

Dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah dan harus dialokasikan untuk desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. ADD berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70% digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat desa. Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

Rumus pembagian alokasi dana desa menggunakan dasar asas adil dan merata. Asas adil merupakan besarnya alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasar pada nilai bobot desa yang telah dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau disebut alokasi dana desa proporsional. Sedangkan asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa atau disebut alokasi dana desa minimal.

### Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang saham untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasinya, atau pertanggungjawaban pimpinan kepada pihak yang membutuhkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber atau pendanaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan asas yang menentukan hasil akhir suatu kegiatan penyelenggaraan kegiatan desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya harus mampu menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan yang disajikan berupa gambaran kegiatan operasional pemerintah atau kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban.

### **Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas penggunaan sumberdaya publik kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui proses anggaran sebagai bentuk transparansi, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keterbukaan dalam lingkungan pemerintahan untuk memberikan informasi dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dan mengelola keuangan desa. Masyarakat berhak mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa, hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas pengawasan masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa.

Menurut Sugista (2017) transparansi dapat mengurangi ketidak pastian dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana desa. Dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat yang awalnya akses hanya dimiliki oleh pemerintah sekarang masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan melalui rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Adanya transparansi juga dapat mengurangi peluang korupsi dalam lingkungan pemerintah desa karna keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas kinerjanya dalam mengelola keuangan desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa.

### **Kebijakan Desa**

Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang dipilih dan diterapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah peraturan hukum dalam pemerintahan atau wewenang pemerintahan yang diatur oleh hukum. Kebijakan desa terdapat pada peraturan desa yang merupakan bentuk tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, bukan berarti menjalankan otonomi secara independen tetapi kebijakan desa tetap berada dalam pengawasan dan wewenang pemerintah kota atau kabupaten. Walaupun begitu, desa masih mempunyai hak untuk menentukan arah pembangunan nasional dan pembangunan desanya sendiri.

Pemerintah desa memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang bersifat formal yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun dari sudut pandang formalitas secara tradisional setiap kampung memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan masalahnya.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, kebutuhan sandang pangan yang tercukupi biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas serta kondisi tiap individu yang mampu memaksimalkan utilitasnya pada batas anggaran dan kondisi jasmani rohani yang terpenuhi.

Pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan, seperti dalam pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah untuk mencapai kemakmuran masyarakat, oleh karena itu pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan berupa Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

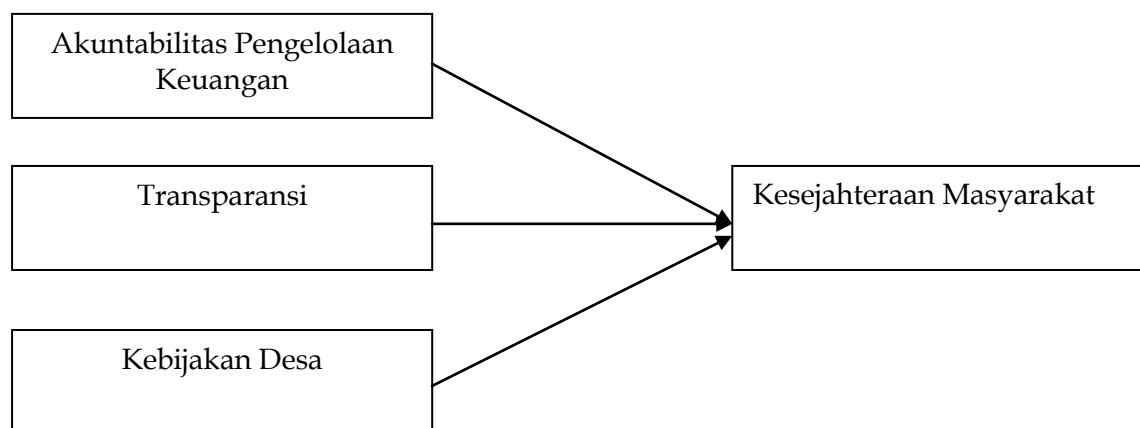
Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. dan upaya dalam kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, prilaku, dan memanfaatkan sumber daya melalui kegiatan, program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **PENELITIAN TERDAHULU**

Pertama, Sari (2018), Komang, *et al.* (2017), dan Wardana (2016) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat. Yaitu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik juga akuntabel, dan juga mampu memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Kedua, Sangki *et al* (2017), dan Sari (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara transparansi dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Sengaji (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berhubungan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yaitu sudah dilakukannya kebijakan sesuai dengan sasaran yang diperlukan oleh masyarakat sekitar.

### **RERANGKA KONSEPTUAL**

Rerangka konseptual penelitian disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Rerangka Konseptual**

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (APADD)**

Menurut Sari (2018), Komang *et al.* (2017), dan Wardana (2016) dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh

positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karna menurut masyarakat penyajian laporan keuangan yang telah disajikan sudah sesuai dengan prosedur, akan tetapi pengawasan yang dilakukan kurang meyakinkan. Dalam laporan juga telah dijelaskan dana yang masuk dan keluar serta rincian dana yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa.

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam penelitian Sangki *et al.* (2017), dan Sari (2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai informasi keuangan desa melalui berbagai media sangat membantu masyarakat untuk mengakses atau mengetahui informasi tersebut. Dengan adanya transparansi dapat memberikan kepercayaan masyarakat desa karna mereka ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hal itu yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan.

H<sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Kebijakan Desa (KD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Sengaji (2018) menyatakan bahwa Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. hal ini dikarenakan pemerintah mampu memberikan layanan dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Dana desa berperan penting untuk membuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa serta melaksanakan program program desa.

H<sub>3</sub>: Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian, Populasi, dan Pengambilan Sampel**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode penelitian kasual komparatif. Metode ini merupakan penelitian yang menggunakan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa dan variable dependennya adalah Kesejahteraan Masyarakat.

Menurut Sugiyono (2009) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti dan kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja dilingkungan pemerintahan desa dan yang bertempat tinggal di Desa Randu Padangan kecamatan Menganti Gresik. Tempat penelitian tersebut digunakan sebagai tempat pelaksanaan penelitian serta tempat untuk memperoleh data, keterangan dan hal-hal penting lainnya yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan *Sampling Jenuh* (Sensus). Metode ini merupakan pengambilan sampel yang dipilih adalah semua anggota populasi yang akan dijadikan sampel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan membagikan kuesioner untuk mendapatkan respon masyarakat guna mengetahui apakah variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Penelitian ini juga membutuhkan dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih relevan dan akurat berupa sejumlah data yang berupa tulisan untuk memenuhi kebutuhan

penulis. dokumen ini diperoleh dari pemerintahan Desa Randu Padangan berupa laporan keuangan tahunan APBDesa, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Kebijakan Desa. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini, variabel independen dan variabel dependen diukur menggunakan kuisioner yang skala likertnya dari nilai 1 sampai 5 dalam tiap pertanyaan.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang saham untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasinya, atau pertanggungjawaban pimpinan kepada pihak yang membutuhkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber atau pendanaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan.

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa menurut Sari (2018) adalah: Perencanaan, yang dimaksud perencanaan adalah mengenai rincian dana penggunaan keuangan desa kepada masyarakat. Pelaksanaan dan pengawasan adanya pengawasan dari tim pelaksanaan terhadap penggunaan keuangan desa. Dan tanggungjawab yaitu adanya laporan akhir tahun yang telah disusun oleh pemerintah desa mengenai pengembangan dan masalah yang dihadapi serta solusi yang diambil untuk penyelesaian akhir penggunaan dana desa.

#### **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas penggunaan sumberdaya publik kepada masyarakat.

Indikator transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa menurut Sari (2018) adalah Hak masyarakat yaitu adanya musyawarah mengenai rencana penggunaan uang desa. Dan keterbukaan yaitu adanya informasi dokumen mengenai laporan keuangan desa, dan keterbukaan informasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

#### **Kebijakan Desa**

Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang dipilih dan diterapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah peraturan hukum dalam pemerintahan atau wewenang pemerintahan yang diatur oleh hukum. Indikator kebijakan desa menurut Sengaji (2018) adalah akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan Layanan, akuntabilitas, kesesuaian Kebutuhan.

#### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, kebutuhan sandang pangan yang tercukupi biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas serta kondisi tiap individu yang mampu memaksimalkan utilitasnya pada batas anggaran dan kondisi jasmani rohani yang terpenuhi. Indikator kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan, pendidikan, pendapatan atau ekonomi.

## UJI INSTRUMEN DATA

### Teknik Penentuan Skor

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuisisioner kepada responden yang telah dipilih untuk mendapatkan data primernya. Responden diberikan pilihan jawaban yang telah diberi skor dalam tiap pilihannya. skor menggunakan skala likert 1 sampai 5 sehingga dapat diuji menggunakan analisis kuantitatif.

### Uji Validitas

Data dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuisisioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. (Ghozali, 2016). Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisisioner tersebut diuji dengan faktor terkait. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel dengan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ . Dalam hal ini  $n$  merupakan jumlah sample. Untuk menguji apakah masing-masing indikator tersebut valid atau tidak dapat dilihat dari tampilan *output cronbach alpha* yaitu pada kolom *Correlation Item - Total Correlation*.

### Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) uji reliabilitas adalah alat untuk menguji kuisisioner. Suatu kuisisioner yang reliabel dan handal apabila jawaban yang diberikan seseorang mengenai pertanyaan kuisisioner tersebut konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja.

## TEKNIK ANALISIS DATA

### Model Regresi Berganda

Analisis ini dipakai karena dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD), Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD), dan Kebijakan Desa (KD) yang diprediksi dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu Kesejahteraan Masyarakat (KM). Berikut merupakan model regresi berganda yang digunakan:

$$KM = \alpha + \beta_1 APADD_1 + \beta_2 TPADD_2 + \beta_3 KD_3 + e$$

Keterangan:

KM	= Kesejahteraan Masyarakat
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien regresi dari variabel independen
APADD	= Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa
TPADD	= Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
KD	= Kebijakan Desa
e	= <i>Error term</i>

## UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu atau yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogrov-Smirnov atau dengan menggunakan uji normal P-P Plot.

### Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila variabel tersebut saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal artinya nilai korelasian antar variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dalam penelitian ini dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi.



Nilai *cuttoff* yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau nilai VIF  $> 10$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lain. Apabila dalam pengamatan satu dengan pengamatan lain terdapat variance dan residual yang tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat atau dependen yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y merupakan Y yang sudah diprediksi sedangkan sumbu X adalah residual.

### Uji Kelayakan Model

#### *Goodness of Fit* (Uji F)

Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikan F  $> 0,05$  maka variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen dan apabila nilai signifikan F  $< 0,05$  maka variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi merupakan ukuran penting dalam regresi untuk menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, artinya semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin baik model regresi ini dalam menjelaskan variasi variabel dependen oleh variabel independen.

### Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Kriteria pengujian uji t adalah: jika nilai signifikan t  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan jika nilai signifikan t  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Berarti variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Randu padangan, Desa Randu padangan merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pembagian ADD dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar 30% setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan pemerintahan desa, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan pemerintahan desa. Peraturan pembagian presentase tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

## Hasil Analisis Data Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan  $N = 75$  dan  $\alpha$  sebesar 5% sehingga menghasilkan nilai  $r$  tabel 0.230 dengan ketentuan jika hasil  $r$  hitung  $> 0.230$  dan bernilai positif dapat dikatakan valid, sedangkan jika hasil  $r$  hitung  $< 0.230$  dan bernilai negatif dikatakan tidak valid.

**Tabel 1**  
Hasil uji validitas

Variabel	Item Pernyataan	$r$ hitung	$r$ tabel ( $\alpha=5\%$ )	Keterangan
Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	APADD1	0.656	0.230	Valid
	APADD2	0.831	0.230	Valid
	APADD3	0.822	0.230	Valid
	APADD4	0.838	0.230	Valid
Transparansi pengelolaan alokasi dana desa	TPADD1	0.685	0.230	Valid
	TPADD2	0.774	0.230	Valid
	TPADD3	0.780	0.230	Valid
Kebijakan desa	KD1	0.669	0.230	Valid
	KD2	0.615	0.230	Valid
	KD3	0.697	0.230	Valid
	KD4	0.685	0.230	Valid
	KD5	0.687	0.230	Valid
	KD6	0.617	0.230	Valid
	KD7	0.607	0.230	Valid
Kesejahteraan Masyarakat	KM1	0.652	0.230	Valid
	KM2	0.642	0.230	Valid
	KM3	0.727	0.230	Valid
	KM4	0.684	0.230	Valid
	KM5	0.676	0.230	Valid
	KM6	0.599	0.230	Valid
	KM7	0.630	0.230	Valid

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

## Uji Reliabilitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa jawaban dari responden dikatakan reliabel terhadap pertanyaan apabila jawaban dari pertanyaan konsisten atau jawaban tidak acak untuk pengukuran hal yang sama pada setiap variabel dalam pertanyaan. Pada penelitian ini, diuji menggunakan koefisien *Cronbach's alpha*. Jika *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60 maka dikatakan reliabel atau konsisten. Berikut merupakan hasil reliabilitas dalam penelitian ini:

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
Akuntabilitas Pengelolaan ADD	.797	4
Transparansi	.605	3
Kebijakan Desa	.776	7
Kesejahteraan Masyarakat	.777	7

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau konstan.

### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Pada kuisisioner penelitian terdapat pernyataan-pernyataan yang berbentuk *skala likert* untuk tiap-tiap variabel, baik variabel dependen atau variabel independen. Dimana pernyataan tersebut berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut berjumlah 21 pernyataan yang dibagi 4 pernyataan untuk akuntabilitas, 3 pernyataan untuk transparansi, 7 pernyataan untuk kebijakan desa dan 7 pernyataan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kuisisioner ini para responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, dan kesejahteraan masyarakat. penilaian dilakukan dengan *skala likert* 1 sampai 5, dimana nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, nilai 2 untuk jawaban tidak setuju, nilai 3 untuk jawaban ragu-ragu, nilai 4 untuk jawaban setuju dan nilai 5 digunakan untuk menjawab sangat setuju. Hasil pengujian statistik deskriptif variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APADD	75	13.00	20.00	17.6800	2.09000
TPADD	75	10.00	15.00	13.2700	1.60000
KD	75	15.00	35.00	29.3100	4.11000
KM	75	23.00	35.00	30.4900	3.68000
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APADD), dimana nilai minimum adalah 13.00 dan nilai maksimum sebesar 20.00. Pada variabel APADD memiliki standar deviasi 2.09000 yang artinya responden memiliki jawaban yang beragam. Dengan pernyataan yang berjumlah 4 dihasilkan rata-rata 17.6800.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (TPADD). Nilai minimumnya adalah 10.00 dan nilai maksimum sebesar 15.00. Dengan jumlah 3 pertanyaan dalam variabel transparansi menghasilkan rata-rata 13.2700. Standar deviasi dalam uji statistic transparansi menghasilkan standar deviasi 1.60000 yang berarti jawaban dari responden sangat beragam.

Kebijakan Desa (KD), nilai minimum dalam tabel tersebut adalah 15.00 dan memiliki nilai maksimum sebesar 35.00. Dengan jumlah pernyataan dalam kuisisioner berjumlah 7 menghasilkan standar deviasi sebesar 4.11000 dan rata-rata 29.3100 yang berarti jawaban responden beragam.

Kesejahteraan Masyarakat (KM) terdapat nilai minimum 23.00 sedangkan nilai maksimumnya adalah 35.00. Dengan jumlah pernyataan dalam kuisisioner berjumlah 7 menghasilkan rata-rata sebesar 30.4900 yang artinya jawaban responden beragam. Standar deviasi dalam variabel ini menghasilkan standar deviasi 3.68000.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui berapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian ini, yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Data yang telah diperoleh dari jawaban kuisisioner yang telah dibagikan kepada responden, kemudian diolah dengan SPSS versi 20 dengan menggunakan hasil perhitungan yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.539	4.463		5.498	.000
APADD	.523	.165	.356	3.170	.002
TPADD	-.481	.227	-.239	-2.119	.038
KD	.105	.098	.117	1.071	.288

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan pada perhitungan dalam tabel 4, maka prediksi Kesejahteraan Masyarakat (KM) dapat dilakukan dengan model regresi berganda berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1 APADD_1 + \beta_2 TPADD_2 + \beta_3 KD_3 + e$$

$$KM = 24.539 + 0.52 - 0.481 + 0.105 + e$$

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dalam regresi menghendaki nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan juga menggunakan uji normal P-P Plot. Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, nilai residual berdistribusi normal  $K \text{ hitung} < K \text{ tabel}$  atau nilai  $\text{sig.} > \alpha$ .

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual	
N	75	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.22177623
	Absolute	.097
Most Extreme Differences	Positive	.097
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z	.838	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.484	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

#### Uji Multikolinearitas

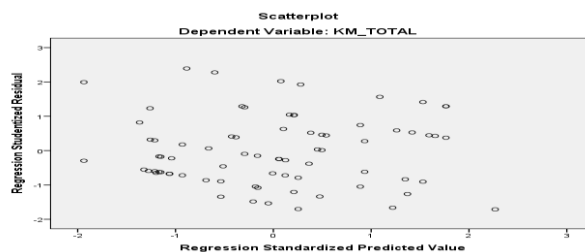
Uji multikolinearitas Untuk dapat mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak, yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila hasil pengujian diperoleh nilai  $TOL > 0.10$  dan  $VIF < 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
APADD	.944	1.059
TPADD	.937	1.067
KD	.990	1.010

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 2**  
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Uji heteroskedastisitas menyatakan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas, dan memenuhi asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas.

### Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen yang digunakan secara bersama-sama apakah mampu menjelaskan variabel dependen, sehingga model regresi hasil analisa layak untuk digunakan. Hasil uji F dihasilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.461	3	22.487	4.371	.007 <sup>b</sup>
	Residual	365.285	71	5.145		
	Total	432.747	74			

a. Dependent Variable: KM\_TOTAL

b. Predictors: (Constant), KD\_TOTAL, APADD\_TOTAL, TPADD\_TOTAL

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 menyatakan bahwa hasil hitung nilai F adalah 4.371 dengan signifikansi 0.007, dimana signifikan tersebut < 0.05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian. Artinya, semua variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, Transparansi, dan Kebijakan desa layak untuk menjelaskan variabel dependennya yaitu Kesejahteraan masyarakat.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 8**  
Hasil Uji determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.395 <sup>a</sup>	.156	.120	2.26823

a. Predictors: (Constan), KD\_TOTAL, APADD\_TOTAL, TPADD\_TOTAL

b. Dependent Variable: KM\_TOTAL

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square pada penelitian ini adalah 0.156 atau 1.56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara simultan dikatakan semakin kuat, maka model ini dikatan layak.

### Pengujian Hipotesis

Apabila nilai signifikan uji t > 0.05 maka, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Berarti, variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi

dan kebijakan desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila nilai signifikan uji  $t < 0.05$  maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti, variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai  $t$  tabel ( $3.170 > 1.666$ ) dengan tingkat signifikansi 5% ( $0.002 < 0.050$ ).

Berdasarkan pada penelitian tersebut dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal itu ditunjukkan dari jawaban para responden dalam mengisi kuisioner yang telah dibagikan. Mereka menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan pernyataan mengenai adanya laporan keuangan alokasi dana desa kepada masyarakat.

Variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, karena menurut responden pertanggungjawaban telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang diukur dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2018), Komang *et al.* (2017), dan Wardana (2016) yang menyatakan bahwa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik juga akuntabel, dan juga mampu memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

#### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Sesuai dengan uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari nilai  $t$  tabel ( $-2.119 < 1.666$ ) dengan tingkat signifikansi 5% ( $0,038 < 0.050$ ).

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat ditunjukkan bahwa semakin menurunnya transparansi maka kesejahteraan masyarakat juga tidak akan meningkat. Dikarenakan menurut pernyataan responden mengenai transparansi yang diterapkan belum sesuai artinya masih kurang dalam melibatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden dalam menjawab kuisioner yang telah dibagikan.

Variabel transparansi dalam penelitian ini menyatakan berpengaruh secara negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena menurut responden belum terpenuhinya hak masyarakat dan keterbukaan mengenai alokasi dana desa kepada masyarakat. Sehingga pemerintah desa harus lebih meningkatkan lagi keterbukaan kepada masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sangki *et al.* (2017), dan Sari (2018) yang menyatakan bahwa transparansi masih harus diperbaiki karena kurangnya akses informasi mengenai perencanaan alokasi dana desa.

#### **Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  tabel ( $1.071 < 1.666$ ) dengan tingkat signifikan 5% ( $0.288 > 0.050$ ). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan anggapan bahwa kebijakan

desa yang telah direncanakan tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program-program kebijakan desa memang sudah dibuat oleh pemerintahan desa tetapi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kesesuaian kebijakan desa dengan tujuan dan sasaran membuat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sengaji (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan desa sudah dilakukan sesuai dengan sasaran yang diperlukan oleh masyarakat sekitar.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian ini yang menggunakan regresi linier berganda sebagai alat pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang dilakukan dengan baik oleh pemerintahan desa dan dapat dipertanggungjawabkan berupa laporan keuangan yang terperinci dan jelas. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, transparansi belum mampu memberikan hak keterbukaan kepada masyarakat karena kurangnya akses informasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam memberikan informasi mengenai program dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Dan hasil pengujian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan program-program yang dibuat oleh pemerintahan belum sesuai dengan tujuan dan sasaran.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, tetapi dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut: penelitian ini hanya dilakukan dalam satu desa atau hanya satu tempat penelitian, dan sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada aparat dan juga pengurus organisasi kemasyarakatan saja. Penelitian ini hanya berfokus pada pengisian kuisioner yang dibagikan kepada aparat desa dan pengurus organisasi kemasyarakatan sehingga hanya berfokus pada pendapat para pengurus. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen saja yaitu, akuntabilitas, transparansi dan kebijakan desa. Sedangkan masih banyak lagi variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan kesimpulan yang ada peneliti memberikan saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan penelitian ini, dan menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Untuk pemerintahan desa diharapkan agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan agar masyarakat lebih tau dan dapat mempercayai pemerintahan sebagai pengelola keuangan dari alokasi dana desa, dan lebih melibatkan banyak masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan agar sebagian masyarakat mengetahui penggunaan alokasi dana desa, untuk masyarakat diharapkan agar lebih aktif dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat juga dapat memberikan saran serta masukan kepada pemerintahan dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat juga harus berpartisipasi dalam perkembangan desanya, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberikan temuan empiris baru. Peneliti

selanjutnya juga dapat menggunakan indikator lain sesuai dengan yang diperlukan serta dapat menambahkan kuisioner sesuai dengan kondisi peneliti, sehingga dapat memberikan jawaban yang valid dan rinci.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26-32.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Aplikasi SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [http://randupadangandesa.gresikkab.go.id/wordpress/profil-desa/](http://randupadangandesa.gresikkab.go.id/wordpress/profil-des/). Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Komang, A., A. T. Atmajadan M. Pradana. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (*Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan*). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 2(1):1-15
- Kurniawati, Y. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung, Kebijakan Kampung, dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. 12(2): 77-87.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Penggunaa Dana Desa Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 99. Jakarta.
- Sangki, A., R. Gosal, dan J. Kairupan. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaan Mangondow). *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sari, A. N. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sugista, R. A. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wardana, I. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Semarang.